



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR : 1 TAHUN 2015  
TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2014, perlu dilakukan perhitungan terhadap Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5074);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 15);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 18);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2014 Nomor 05).

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP**  
dan  
**BUPATI SUMENEP**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014**

### Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. neraca;
- c. laporan arus kas; dan
- d. catatan atas laporan keuangan.

### Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.647.362.227.719,17	
b. Belanja	<u>Rp. 1.607.328.844.636,22</u>	
Surplus		Rp. 40.033.383.082,95
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp. 290.885.683.089,53	
2. Pengeluaran	<u>Rp. 55.184.340.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp. <u>235.701.343.089,53</u>
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 275.734.726.172,48	

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1). Selisih target dengan realisasi pendapatan sejumlah		
Rp. 41.158.579.065,17 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp.1.772.227.628.190,00	
b. Realisasi	<u>Rp.1.647.362.227.719,17</u>	
Kelebihan Target Pendapatan	Rp. 41.158.579.065,17	
(2). Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah		
Rp. 164.898.783.553,78 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp.1.625.305.835.296,00	
b. Realisasi	<u>Rp.1.607.328.844.636,22</u>	
Efisiensi Belanja	Rp. 164.898.783.553,78	
(3). Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah		
Rp. 206.057.362.618,95 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Surplus/defisit setelah Perubahan	Rp. (166.023.979.536,00)	
b. Realisasi	<u>Rp. 40.033.383.082,95</u>	
Selisih Lebih	Rp. 206.057.362.618,95	
(4). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :		
a. Penerimaan		
1. Setelah Perubahan	Rp. 290.441.139.725,00	
2. Realisasi	<u>Rp. 290.885.683.089,53</u>	
Selisih Lebih	Rp. 444.543.364,53	
b. Pengeluaran		
1. Setelah Perubahan	Rp. 124.417.160.189,00	
2. Realisasi	<u>Rp. 55.184.340.000,00</u>	
Selisih Kurang	Rp. 69.232.820.189,00	

- (5). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan Neto sejumlah Rp. 69.677.363.553,53 dengan rincian sebagai berikut :
- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan neto |                               |
| Setelah Perubahan           | Rp. 166.023.979.536,00        |
| b. Realisasi                | <u>Rp. 235.701.343.089,53</u> |
| Selisih Lebih               | Rp. 69.677.363.553,53         |

#### **Pasal 4**

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| a. Jumlah Aktiva       | Rp.3.321.728.558.719,16 |
| b. Jumlah Utang        | Rp. 2.383.667.886,80    |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp.3.319.344.890.832,36 |

#### **Pasal 5**

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2014                | Rp. 284.611.987.513,22   |
| b. Arus Kas dari aktivitas Operasi                        | Rp. 309.015.869.150,07   |
| c. Arus Kas dari aktivitas Investasi Aset non<br>Keuangan | Rp. (276.074.332.206,54) |
| d. Arus Kas dari aktivitas Pembiayaan                     | Rp. (54.739.796.636,00)  |
| e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran                   | Rp. 0,00                 |
| f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2014             | Rp. 275.763.227.732,02   |

#### **Pasal 6**

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

#### **Pasal 7**

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi APBD;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan.
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
  - Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah
  - Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah)

- Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya.
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
- Lampiran I.10: Daftar Dana Cadangan Daerah
- Lampiran I.11: Daftar Penjaminan Daerah dan Obligasi Daerah
2. Lampiran II : Neraca;
  3. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
  4. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan;

### **Pasal 8**

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : 5 Agustus 2015

**BUPATI SUMENEP**



**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, MSi**

Diundangkan di : Sumenep  
pada tanggal : 5 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SUMENEP**

**Drs. HADI SOETARTO, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580618 198107 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2015 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 206-1/2015**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP

NOMOR : 1 Tahun 2015

TANGGAL :

**05 AUG 2015**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH / (SISA)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.606.203.648.654,00</b>	<b>1.647.362.227.719,17</b>	<b>41.158.579.065,17</b>	<b>102,56</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>143.671.121.947,00</b>	<b>162.371.865.154,17</b>	<b>18.700.743.207,17</b>	<b>113,02</b>
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	17.616.525.497,00	14.513.053.554,55	(3.103.471.942,45)	82,38
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	17.079.119.550,00	15.794.071.399,00	(1.285.048.151,00)	92,48
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.264.500.000,00	11.907.362.458,91	(2.357.137.541,09)	83,48
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	94.710.976.900,00	120.157.377.741,71	25.446.400.841,71	126,87
<b>4.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.193.856.290.082,00</b>	<b>1.219.793.909.333,00</b>	<b>25.937.619.251,00</b>	<b>102,17</b>
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	145.446.645.082,00	171.384.264.333,00	25.937.619.251,00	117,83
4.2.2	Dana Alokasi Umum	984.839.445.000,00	984.839.445.000,00	0,00	100,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	63.570.200.000,00	63.570.200.000,00	0,00	100,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>268.676.236.625,00</b>	<b>265.196.453.232,00</b>	<b>(3.479.783.393,00)</b>	<b>98,70</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	859.840.000,00	1.098.027.925,00	238.187.925,00	127,70
4.3.3	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	45.963.272.625,00	44.641.376.307,00	(1.321.896.318,00)	97,12
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	175.635.664.000,00	173.152.039.000,00	(2.483.625.000,00)	98,59
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	46.047.460.000,00	46.305.010.000,00	257.550.000,00	100,56
4.3.6	Bantuan Keuangan dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Kelompok Masyarakat/ individu	170.000.000,00	0,00	(170.000.000,00)	0,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH / (SISA)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.772.227.628.190,00</b>	<b>1.607.328.844.636,22</b>	<b>(164.898.783.553,78)</b>	<b>90,70</b>
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.082.550.852.763,00</b>	<b>1.021.300.512.004,20</b>	<b>(61.250.340.758,80)</b>	<b>94,34</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	895.110.589.919,00	848.364.146.944,20	(46.746.442.974,80)	94,78
5.1.4	Belanja Hibah	93.643.250.000,00	83.214.089.100,00	(10.429.160.900,00)	88,86
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.688.400.000,00	3.820.550.000,00	(867.850.000,00)	81,49
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	85.108.612.844,00	83.979.354.960,00	(1.129.257.884,00)	98,67
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	1.922.371.000,00	(2.077.629.000,00)	48,06
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>689.676.775.427,00</b>	<b>586.028.332.632,02</b>	<b>(103.648.442.794,98)</b>	<b>84,97</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	54.060.611.919,00	48.470.492.942,00	(5.590.118.977,00)	89,66
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	310.844.134.092,00	259.772.481.458,48	(51.071.652.633,52)	83,57
5.2.3	Belanja Modal	324.772.029.416,00	277.785.358.231,54	(46.986.671.184,46)	85,53
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(166.023.979.536,00)</b>	<b>40.033.383.082,95</b>	<b>206.057.362.618,95</b>	<b>(24,11)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH / (SISA)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
6	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	290.441.139.725,00	290.885.683.089,53	444.543.364,53	100,15
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	290.441.139.725,00	290.441.139.725,53	0,53	100,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	444.543.364,00	444.543.364,00	100,00
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	124.417.160.189,00	55.184.340.000,00	(69.232.820.189,00)	44,35
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	31.884.340.000,00	31.884.340.000,00	0,00	100,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	92.532.820.189,00	23.300.000.000,00	(69.232.820.189,00)	25,18
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	166.023.979.536,00	235.701.343.089,53	69.677.363.553,53	141,97
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	275.734.726.172,48	275.734.726.172,48	100,00

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**DAFTAR PIUTANG DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pengurangan Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 - 6
1	Piutang Pajak	2014	793.386.276,00	12.580.890.333,00	881.639.602,58	12.492.637.006,42
2	Piutang Retribusi	2014	56.284.000,00	15.015.000,00	18.861.600,00	52.437.400,00
3	Piutang Dana Bagi Hasil	2014	10.549.871.933,33	6.917.027.409,81	3.085.867.026,03	14.381.032.317,11
4	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2014	193.936.250,00	7.000.000,00	114.402.924,00	86.533.326,00
5	Piutang Lain-lain	2014	11.860.585.413,21	1.030.460.010,64	0,00	12.891.045.423,85
<b>JUMLAH</b>			23.454.063.872,54	20.550.392.753,45	4.100.771.152,61	39.903.685.473,38

**BUPATI SUMENEP**



**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah  (Rp)	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan awal tahun  (Rp)	Penyertaan Modal Tahun ini  (Rp)	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun ini  (Rp)	Sisa Modal yang belum disertakan  (Rp)	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun ini  (Rp)	Jumlah Modal (Investasi) yang diterima kembali tahun ini  (Rp)	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini  (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
1	2014	Bank Jatim Cab. Sumenep	Perda No. 7 Th. 2012	SAHAM	36.057.107.750,00	36.057.107.750,00	0,00	36.057.107.750,00	0,00	0,00	0,00	36.057.107.750,00
2	2014	PT. Sumekar Lines	Perda No. 7 Th. 2003	PENYERTAAN MODAL	15.500.000.000,00	15.500.000.000,00	0,00	15.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000.000,00
3	2014	BPRS	Perda No. 6 Th. 2003	PENYERTAAN MODAL	83.300.000.000,00	60.000.000.000,00	23.300.000.000,00	83.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	83.300.000.000,00
4	2014	PD. Sumekar	Perda No. 15 Th. 2003	PENYERTAAN MODAL	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5	2014	PDAM	Perda No. 21 Th. 1974	PENYERTAAN MODAL	15.782.796.883,00	15.782.796.883,00	0,00	15.782.796.883,00	0,00	0,00	0,00	15.782.796.883,00
6	2014	PT. Wira Usaha Sumekar		SAHAM	7.453.692.348,40	7.453.692.348,40	0,00	7.453.692.348,40	0,00	0,00	0,00	7.453.692.348,40
7	2014	BRI, BPRS, BNI, BTN, Bank JATIM Cab. Sumenep dan Cab. Kangean	Perda No. 19 Th. 2013	(DEPOSITO)	66.535.000.000,00	66.535.000.000,00	0,00	66.535.000.000,00	0,00	0,00	0,00	66.535.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					224.682.596.981,40	201.382.596.981,40	23.300.000.000,00	224.682.596.981,40	0,00	0,00	0,00	224.682.596.981,40

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
I	Tanah	288.666.234.922,00	19.927.605.233,00	0,00	308.593.840.155,00
I.1	Tanah	288.666.234.922,00	19.927.605.233,00	0,00	308.593.840.155,00
II	Peralatan dan Mesin	267.279.246.700,25	39.867.599.012,00	2.283.795.163,00	304.863.050.549,25
II.1	Alat-alat Berat	28.823.431.501,00	2.482.243.805,00	0,00	31.305.675.306,00
II.2	Alat-alat Angkutan	64.979.714.413,00	11.774.684.308,00	535.327.000,00	76.219.071.721,00
II.3	Alat Bengkel	6.713.562.600,00	907.662.500,00	24.177.500,00	7.597.047.600,00
II.4	Alat Pertanian dan Peternakan	7.279.519.650,00	242.399.000,00	3.750.000,00	7.518.168.650,00
II.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	93.322.211.487,75	14.500.693.710,00	1.444.824.663,00	106.378.080.534,75
II.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	12.208.767.752,00	1.132.814.390,00	275.346.000,00	13.066.236.142,00
II.7	Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00
II.8	Alat-alat Kedokteran	23.311.954.201,50	4.791.837.849,00	0,00	28.103.792.050,50
II.9	Alat Laboratorium	30.450.555.095,00	4.025.063.450,00	0,00	34.475.618.545,00
II.10	Alat Keamanan	189.530.000,00	10.200.000,00	370.000,00	199.360.000,00
III	Gedung dan Bangunan	553.705.211.288,02	64.314.253.887,52	965.800.849,83	617.053.664.325,71
III.1	Bangunan Gedung	542.629.980.478,32	56.939.442.287,52	965.800.849,83	598.603.621.916,01
III.2	Bangunan Monumen	11.075.230.809,70	7.374.811.600,00	0,00	18.450.042.409,70

NO	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
<b>IV</b>	<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	<b>1.325.612.142.426,91</b>	<b>156.080.815.030,40</b>	<b>11.238.636.920,00</b>	<b>1.470.454.320.537,31</b>
IV.1	Jalan dan Jembatan	1.032.923.554.301,13	100.206.677.610,40	9.477.277.520,00	1.123.652.954.391,53
IV.2	Bangunan Air (Irigasi)	198.365.053.458,29	22.628.968.420,00	5.592.000,00	220.988.429.878,29
IV.3	Instalasi	17.741.919.509,00	8.821.752.000,00	0,00	26.563.671.509,00
IV.4	Jaringan	76.581.615.158,49	24.423.417.000,00	1.755.767.400,00	99.249.264.758,49
<b>V</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>29.841.358.418,80</b>	<b>2.933.403.525,00</b>	<b>1.776.339.800,00</b>	<b>30.998.422.143,80</b>
V.1	Buku dan Perpustakaan	26.536.289.746,00	2.854.707.525,00	2.494.800,00	29.388.502.471,00
V.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	540.826.450,00	7.000.000,00	15.000,00	547.811.450,00
V.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	994.312.222,80	71.696.000,00	3.900.000,00	1.062.108.222,80
V.4	Lainnya	1.769.930.000,00	0,00	1.769.930.000,00	0,00
<b>VI</b>	<b>Konstruksi dalam Pengerjaan</b>	<b>11.196.510.214,00</b>	<b>3.743.667.450,00</b>	<b>5.402.026.975,00</b>	<b>9.538.150.689,00</b>
VI.1	Konstruksi dalam Pengerjaan	11.196.510.214,00	3.743.667.450,00	5.402.026.975,00	9.538.150.689,00
<b>VII</b>	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VII.1	Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.476.300.703.969,98</b>	<b>286.867.344.137,92</b>	<b>21.666.599.707,83</b>	<b>2.741.501.448.400,07</b>

**BUPATI SUMENEP**



**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	Uraian Aset Lainnya	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tuntutan Perbendaharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tuntutan Ganti Rugi	62.530.000,00	0,00	10.000.000,00	52.530.000,00
4	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	14.230.429.653,00	0,00	0,00	14.230.429.653,00
5	Aset Tak Berwujud	14.904.506.600,00	2.223.039.000,00	0,00	17.127.545.600,00
6	Aset Lain-Lain	8.763.486.103,00	0,00	172.873.500,00	8.590.612.603,00
7	Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi	(62.530.000,00)	0,00	(10.000.000,00)	(52.530.000,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>37.898.422.356,00</b>	<b>2.223.039.000,00</b>	<b>172.873.500,00</b>	<b>39.948.587.856,00</b>

**BUPATI SUMENEP**



**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

**DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR  
TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA  
TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING		JUMLAH REALISASI			JUMLAH AKUMULASI REALISASI s.d AKHIR TAHUN N	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA
		TAHUN N - 2, TAHUN N - 1, TAHUN N				
		REALISASI TAHUN N-2	REALISASI TAHUN N-1	REALISASI TAHUN N		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**DAFTAR DANA CADANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas Daerah (Rp)	Transfer ke Kas Daerah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana yang belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pilkada Tahun 2015	Perda No. 03 Tahun 2010	20.000.000.000,00	16.000.000.000,00	4.000.000.000,00		20.000.000.000,00	0,00
2	Pengadaan Kapal Motor Penumpang 2016	Perda No. 02 Tahun 2014	31.000.000.000,00	0,00	27.844.340.000,00		27.844.340.000,00	3.155.660.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>51.000.000.000,00</b>	<b>16.000.000.000,00</b>	<b>31.844.340.000,00</b>		<b>47.844.340.000,00</b>	<b>3.155.660.000,00</b>

**BUPATI SUMENEP**



**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
DAFTAR PINJAMAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp/Valas)	Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)	Persentase Bunga Pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Realisasi Pembayaran Tahun Ini		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	JUMLAH										

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si